



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN
PELAPORAN PENGADUAN (*WISHTLEBLOWING SYSTEM*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

b. bahwa Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pelaporan Pengaduan (*Whistleblowing System*) memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan hukum mengenai penanganan pelaporan pengaduan terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pelaporan Pengaduan (*Whistleblowing System*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022) Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pelaporan Penngaduan (*Whistleblowing System*) (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN UMUM
SISTEM PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN
(*WISHTLEBLOWING SYSTEM*).**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pelaporan Pengaduan (*Whistleblowing System*) (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah.
5. *Whistleblowing System* (WBS) adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang telah terjadi, sedang terjadi dan/atau akan terjadi yang melibatkan pegawai Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

8. Penyalahgunaan Wewenang adalah penggunaan wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan melampaui wewenang, mencampuradukan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang.
9. Pelapor Pengaduan (*Whistleblower*) yang selanjutnya disebut pelapor adalah seseorang yang mengadukan perbuatan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tersebut.
10. Terlapor adalah seseorang yang dilaporkan oleh pelapor, dalam hal ini pegawai Pemerintah Daerah yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tenaga Kontrak/Non PNS, Perangkat Desa, Pengelola Badan Usaha Milik Daerah dan Kelompok organisasi atau masyarakat yang menggunakan anggaran negara.
11. Pelaporan adalah informasi yang disampaikan oleh pelapor terkait perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran dengan dilengkapi bukti permulaan.
12. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan dalam bentuk aplikasi atau situs web.
13. Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar, rekaman audio dan/atau video yang mendukung atau menjelaskan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran.
14. Tim Penerima Pengaduan adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan pelapor.
15. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidak suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
16. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atau penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
17. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intem

pada Instansi Pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

18. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pimpinan memberikan pemahaman mengenai perlindungan pelapor kepada seluruh pegawai di lingkungannya.
- (2) Perlindungan kepada pelapor yang berasal dari ASN dapat berupa :
 - a. jaminan kerahasiaan identitas dan materi pelaporan;
 - b. perlindungan dari tindakan yang bersifat administratif kepegawaian akibat dari pengaduannya, dapat berupa:
 1. perlindungan dari penurunan jabatan;
 2. perlindungan dari penurunan penilaian kinerja pegawai;
 3. perlindungan dari usulan pemindahan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan; dan/atau
 4. hambatan lainnya.
 - c. tidak menerbitkan kebijakan kepegawaian dan/atau kebijakan lain yang merupakan bentuk tindakan balasan kepada pelapor.
 - d. dalam hal timbul ancaman fisik, bantuan aspek kepegawaian bagi pelapor diberikan oleh Perangkat Daerah yang menangani kepegawaian dapat berupa;
 1. pelaksanaan mutasi dari Instansi pelapor, dengan memperhatikan formasi, kompetensi dan kualifikasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 2. pemulihan hak-hak kepegawaian atas tindakan kesewenang-wenangan sebagai tindakan balasan atas pelaporan pelanggaran.
 - e. bantuan hukum diberikan oleh Perangkat Daerah yang menangani bantuan hukum dapat berupa :
 1. konsultasi hukum;
 2. pendampingan hukum; dan/atau
 3. bantuan hukum
 - f. bantuan permintaan perlindungan kepada Kepolisian Negara Republik

Indonesia dalam hal kasus telah disampaikan ke aparat penegak hukum pada tingkat penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan

g. fasilitasi permintaan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal kasus telah dilimpahkan ke pengadilan sesuai ketentuan perundang-undangan apabila pelapor mengajukan permohonan tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

(3) Perlindungan kepada pelapor yang berasal dari masyarakat meliputi :

MOHD. IDEAL, S.E., MM
Pembina TK I (IV/V)
NIP. 19700323 200212 1 004

a. jaminan kerahasiaan identitas dan materi laporan; dan
b. jaminan pelaporan pelanggaran tidak mempengaruhi layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal diketahui terdapat Aparatur Sipil Negara yang melakukan penyalahgunaan jabatan/wewenang mengintimidasi pelapor atas pelaporan dugaan tindak pidana korupsi, Bupati memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 6 NOVEMBER 2025
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. DILLAH HIKMAH SARI

IRBAN	SEKRETARIS	INSPEKTUR
M. Yanti Caca Cahya	S. HENDRI SY.SE	I. DRS. MADI FIRDAUS, M.SI

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 6 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR
26

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG
JABUNG TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PELAPORAN
PENGADUAN(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan *good governance* suatu entitas baik entitas publik maupun swasta, transparansi merupakan salah satu faktor penting untuk mendorong pimpinan atau pengelola atau pegawai suatu organisasi dalam memberikan kontribusi yang bermanfaat dan bermilai tambah baik bagi organisasi maupun pemangku kepentingan. Terdapat berbagai metode atau cara dalam implementasi transparansi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan *good governance*, salah satunya adalah Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau *Whistleblowing System* (WBS). Melalui SPP/WBS diharapkan sebagai salah satu metode deteksi dini atas terjadinya pelanggaran dimaksud. Dengan adanya implementasi SPP/WBS ini diharapkan budaya keterbukaan semakin meningkat dan mendorong kinerja organisasi, melindungi para pemangku kepentingan serta menjadi salah satu budaya organisasi. Dengan demikian efektivitas fungsi dan tugas pokok dapat tercapai baik dalam rentang waktu pendek maupun panjang.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud.

Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran dimaksudkan sebagai:

- a. acuan dalam menangani pengaduan yang diduga tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap kode etik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. acuan bagi masyarakat/pegawai yang mengetahui atau memiliki informasi dan bukti-bukti tentang suatu pelanggaran yang diduga tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kode etik untuk melaporkan dugaan pelanggaran di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Tim Penerima Pengaduan; dan

- c. acuan didalam memberikan perlindungan kepada Pelapor (whistleblower).

2. Tujuan

Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap kode etik bertujuan untuk:

- a. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap kode etik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. mendorong pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memiliki informasi dan bukti-bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap kode etik untuk melaporkannya;
- c. melindungi pelapor dari rasa tidak aman terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap kode etik yang dilaporkannya; dan
- d. menumbuhkan persepsi masyarakat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bahwa apabila melakukan penyimpangan/kecurangan/pelanggaran, akan semakin besar peluangnya untuk terdeteksi dan dilaporkan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penanganan pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meliputi:

1. kebijakan tentang Penanganan Pengaduan (whistleblowing);
2. penanganan pengaduan dan investigasi terhadap indikasi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran;
3. perlindungan dan penghargaan pelapor;
4. pemberian sanksi dan pemulihan nama baik; dan
5. pelaporan dan pemantauan.

D. Manfaat *Whistleblowing System*

1. media untuk menangani masalah dugaan pelanggaran secara internal sehingga tidak meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik;
2. mengurangi risiko kerugian akibat terjadinya pelanggaran;
3. membantu manajemen untuk menangani laporan dugaan pelanggaran

secara efektif dan melindungi kerahasiaan identitas pelapor;

4. meningkatkan citra instansi; dan
5. memberikan umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan pengendalian internal.

E. Asas Pelaporan Pelanggaran

Secara umum asas-asas dalam pengelolaan sistem pelaporan pelanggaran adalah rahasia (*confidential*), tidak memihak (*impartial*), independen dan perlindungan terhadap Pelapor.

F. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*) adalah pegawai dari organisasi itu sendiri (pihak internal), akan tetapi tidak tertutup adanya pelapor berasal dari pihak eksternal (kontraktor, pemasok, masyarakat). Pelapor seyogyanya memberikan bukti, informasi atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan, sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti. Ketiadaan informasi yang memadai, laporan akan sulit untuk ditindaklanjuti.
2. Saksi adalah seseorang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri tindak pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor dan bersedia memberikan keterangan di depan sidang pengadilan. Seorang pelapor mungkin saja menjadi saksi, tetapi tidak semua pelapor dapat menjadi saksi.
3. Stakeholders adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur baik langsung maupun tidak langsung, yaitu masyarakat, pelaku usaha, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
4. Whistleblowing System (WBS) adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang telah terjadi, sedang terjadi dan/atau akan terjadi yang melibatkan pegawai Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dugaan pelanggaran adalah informasi yang ada di dalam pengaduan, diantaranya mengandung pokok pelanggaran, pelaku pelanggaran, waktu dan tempat kejadian serta kerugian yang dialami.
6. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

7. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau Negara.
8. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan Masyarakat, Bangsa dan Negara.
9. Asas Umum Pemerintahan Negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatuhan dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
10. Kode Etik adalah serangkaian norma-norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap dan bertindak dalam aktivitas sehari-hari yang menuntut tanggungjawab suatu profesi.
11. Investigasi adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur selaku Ketua Tim Penerima Pengaduan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk meneliti kebenaran informasi atau pengaduan/laporan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
12. Bukti Audit adalah segala informasi yang mendukung data yang disajikan dalam laporan keuangan yang terdiri dari data akuntasi dan informasi pendukung lainnya yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.
13. Evaluasi Bukti adalah kegiatan auditor dalam mempelajari, memeriksa, menguji, menelaah, dan menginterpretasikan bukti untuk menilai kesesuaian bukti dengan hipotesis serta sebagai landasan perlu tidaknya mengembangkan bukti lebih lanjut.

BAB II

KEBIJAKAN PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING*)

A. Kriteria dan Data Laporan Pengaduan

Setiap orang yang melihat atau mengetahui, mendengar adanya tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran wajib melaporkan kepada Tim Penerima Pengaduan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaduan yang disampaikan melalui *Whistleblowing System* (WBS) yang mengindikasikan adanya Tindak Pidana Korupsi, penyalahgunaan

wewenang dan pelanggaran.

2. Data dan informasi yang disampaikan pelapor harus memenuhi hal sebagai berikut:
 - a. Laporan adanya dugaan pelanggaran harus didukung dengan bukti-bukti cukup diantaranya:
 - 1) Adanya penyimpangan perbuatan melawan hukum yang dilaporkan;
 - 2) Dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi;
 - 3) Kapan perbuatan melawan hukum terjadi;
 - 4) Siapa pejabat/pegawai yang melakukan penyimpangan perbuatan melawan hukum atau siapa yang terlibat dalam peristiwa melawan hukum; dan
 - 5) Bagaimana cara perbuatan tersebut terjadi.
 - b. Data pengaduan, yang berisi informasi sebagai berikut:
 - 1) Data mengenai nama pelapor, jenis kelamin pelapor, alamat pelapor, nomor *handphone* pelapor, *email* pelapor (bila ada), dan pekerjaan pelapor. Keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana antara lain:
 - a) Nama terlapor;
 - b) Pekerjaan terlapor;
 - c) Perbuatan yang terindikasi atau diduga terdapat penyimpangan atau pelanggaran oleh pelaku;
 - d) Tempat kejadian penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku; dan
 - e) Waktu kejadian penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.
 - 2) Disertai dengan bukti-bukti yang mendukung atau menjelaskan substansi pengaduan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran berupa:
 - a) Data atau dokumen yang relevan;
 - b) Gambar dan/atau rekaman audio dan/atau video.
 - 3) Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional aparatur pengawas/auditor, bahwa informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (*What, When, Where*). Pertimbangan profesional dimaksud adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus

sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut.

B. Mekanisme Penyampaian Laporan Pengaduan

Laporan secara langsung dapat dilakukan oleh pelapor (*Whistleblower*) melalui saluran pengaduan pada alamat <https://wbs.tanjabtimkab.go.id> dengan mengisi data-data laporan sebagai berikut:

1. Data diri pelapor, terdiri dari:
 - a. Nama pelapor;
 - b. Jenis kelamin pelapor;
 - c. Alamat pelapor;
 - d. Nomor handphone pelapor;
 - e. E-mail pelapor (bila ada); dan
 - f. Pekerjaan pelapor.
2. Jenis pelanggaran;
3. Nama terlapor;
4. Pekerjaan terlapor;
5. Tempat kejadian pelanggaran;
6. Waktu kejadian pelanggaran; dan
7. Unggah bukti dokumen, berupa gambar/audio/video.

C. Penanganan Laporan Pengaduan

Pengaduan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tim Penerima Pengaduan, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pencatatan

Pencatatan pengaduan atas pelanggaran yang disampaikan pelapor dilakukan sebagai berikut:

- a. Laporan pengaduan yang disampaikan melalui saluran pengaduan dengan alamat <https://wbs.tanjabtimkab.go.id> dicatat oleh admin WBS.
- b. Pencatatan laporan pengaduan sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
 - 1) Identitas pelapor, terdiri atas:
 - a) Nama;
 - b) Alamat;
 - c) Pekerjaan; dan
 - d) Nomor *handphone* yang bisa dihubungi.
 - 2) Identitas terlapor, terdiri atas:

- a) Nama; dan
- b) Pekerjaan.

2. Penalaahan

- a. Pengaduan/laporan yang telah dicatat oleh Admin kemudian ditelaah guna mengidentifikasi permasalahan/informasi dan merumuskan langkah-langkah penanganan selanjutnya oleh Tim Penelaah yang terdiri dari Inspektur, Inspektur Pembantu yang membidangi WBS dan Auditor/PPUPD yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan Tim Penerima Pengaduan.
- b. Penalaahan minimal yang dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Merumuskan pokok permasalahan;
 - 2) Meneliti kelengkapan dokumen bukti permulaan;
 - 3) Mengumpulkan dan melengkapi data sebagai informasi pendukung;
 - 4) Melakukan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) Menyimpulkan hasil penalaahan dan memutuskan penanganan selanjutnya.
- c. Hasil penalaahan pengaduan dan rekomendasi
 - 1) Pengaduan yang substansinya tidak logis dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak akan dipenuhi dan tidak perlu diproses lebih lanjut.
 - 2) Pelaporan yang substansinya terdapat adanya dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran dilanjutkan dengan audit investigatif.
- d. Dalam hal hasil telaah yang hanya memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*) dan Pelapor (*Whistleblower* diketahui dengan jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang *Whistleblower* untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya Surat Tugas.

3. Pengarsipan

Berkas penanganan pengaduan dugaan adanya tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang disampaikan Pelapor (*Whistleblower* disimpan di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, satuan kerja/unit kerja terlapor serta urutan tanggal pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku, dan arsip pengaduan tersebut bersifat rahasia. Terhadap permintaan informasi oleh pihak lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, media

massa dan lain-lain, dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Bupati.

4. Audit Investigatif

Pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor (*Whistleblower*) dan mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran ditindaklanjuti melalui audit investigatif. Pelaksanaan audit mengacu pada standar audit dan SOP Pemeriksaan Khusus/Pengaduan yang ada pada Inspektorat, antara lain meliputi:

a. Menyusun Perencanaan Audit, terdiri atas:

- 3) Penentuan Tim Audit oleh Inspektur dengan menerbitkan surat tugas.
- 4) Penyiapan kebutuhan sumber daya pendukung antara lain anggaran biaya audit dan sarana prasarana lainnya.

b. Menyusun Program Audit

- 1) Penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan yang relevan dengan permasalahan penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan diperlukan untuk mengidentifikasi jenis pelanggaran dan kriteria yang dapat diterapkan terhadap substansi laporan pengaduan.
- 2) Mendapatkan bukti-bukti yang memadai, pengumpulan, evaluasi dan pengujian bukti-bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti-bukti yang diperolehnya telah relevan, kompeten, cukup dan material.
- 3) Menentukan metode audit yang tepat, pengumpulan bukti-bukti dilakukan dengan menggunakan prosedur, teknik dan metodologi audit yang diperlukan sesuai kondisinya.
- 4) Menentukan pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti-bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti-bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab atau kepada pihak-pihak lainnya yang relevan. Hasil klarifikasi atau konfirmasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK).

a. Menganalisis Bukti

Analisis dilakukan untuk mendapatkan relevansi, kompeten atau tidaknya, kecukupan dan materialitas suatu alat bukti dengan

substansi pokok permasalahan sehingga dapat dijadikan bahan untuk menentukan kesimpulan.

e. Merumuskan Hasil Audit

Dari hasil analisis terhadap bukti-bukti yang ada dan dipandang cukup memadai, dirumuskan hasil audit apakah laporan pengaduan memenuhi unsur tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran atau hanya terjadi pelanggaran administrasi atau bahkan tidak ada penyimpangan atau pelanggaran sama sekali.

f. Menyusun Laporan Hasil Audit

Penyusunan laporan merupakan tahap akhir dari kegiatan audit investigatif. Di dalam laporan audit investigatif disajikan temuan dan informasi penting lainnya, untuk disampaikan kepada Bupati. Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai kondisi informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya seperti BPKP dan Inspektorat Provinsi.

5. Rekomendasi

Rekomendasi hasil audit investigatif atas laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran dapat berupa:

a. Penjatuhan hukuman disiplin

- 1) Rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin;
- 2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut; dan
- 3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin menyampaikan tembusan Keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada Inspektur.

b. Pengembalian kerugian Negara/Daerah

Rekomendasi pengembalian kerugian Negara/ Daerah wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menindaklanjuti.

c. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Penegak Hukum

Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Penegak Hukum, dapat dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan pelanggaran dengan dugaan merugikan keuangan negara atau perekonomian

negara paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) setelah mendapat persetujuan Bupati.

- d. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dapat dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan pelanggaran dengan dugaan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) setelah mendapat persetujuan Bupati.

6. Pelimpahan Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi kepada Penegak Hukum/Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelum dilakukan Pelimpahan Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi kepada Penegak Hukum/Komisi Pemberantasan Korupsi, hasil audit investigatif harus *diekspose* terlebih dahulu dengan Tim Penerima Pengaduan. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan; dan
- b. Tahap Pelaksanaan, meliputi:
 - 1) Pelaksanaan rapat *ekspose* hasil audit investigatif dipimpin oleh Inspektur;
 - 2) Seluruh peserta rapat wajib mematuhi tata tertib rapat *ekspose* hasil audit investigatif;
 - 3) Proses diskusi dalam rapat *ekspose* hasil audit investigatif dituangkan dalam notulen *ekspose* yang ditandatangani oleh notulis, ketua tim dan Inspektur;
 - 4) Bila dalam hasil rapat *ekspose* hasil audit investigatif tidak diperoleh kesepakatan, maka risalah hasil rapat *ekspose* hasil audit investigatif memuat alasan ketidaksepakatan tersebut. Selanjutnya permasalahan tersebut dibahas antar pimpinan pada tingkat yang lebih tinggi dan dituangkan dalam risalah hasil rapat antar pimpinan;
 - 5) Bila dari rapat *ekspose* hasil audit investigatif diperoleh bukti baru yang menambah atau mengurangi nilai kerugian daerah, maka auditor harus melakukan prosedur pengujian untuk meyakini kebenaran bukti-bukti tambahan;
 - 6) Bila dari rapat *ekspose* hasil audit investigatif temyata tidak terjadi perubahan nilai kerugian Negara maka kesepakatan yang

dibuat dalam rapat, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan kepada Bupati; dan

- 7) Kesimpulan rapat *ekspose* hasil audit investigatif dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis dan diketahui oleh Inspektur dengan persetujuan Sekretaris Daerah kemudian disampaikan kepada Bupati.

BAB III

PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN PELAPOR PENGADUAN (*WHISTLEBLOWER*)

A. Perlindungan Terhadap Pelapor

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya Tim Penerima Pengaduan wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor (*Whistleblower*), memberikan perlindungan hukum dan perlakuan wajar kepada pelapor dengan berkordinasi dengan pihak terkait/ instansi yang berwenang. Inspektorat dapat mengungkapkan identitas pelapor (*whistleblower*) untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

Upaya untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor adalah dengan melakukan pengarsipan berkas penanganan laporan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi dengan baik, berkas disimpan di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, instansi/unit kerja terlapor serta urutan waktu pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku. Sedangkan upaya perlindungan bagi pelapor yang mengalami ancaman keselamatan jiwa, Inspektorat wajib berkordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

B. Penghargaan Terhadap Pelapor

Setiap pejabat/pegawai, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran dapat diberi penghargaan sesuai ketentuan perundang- undangan. Bentuk penghargaan diatur dalam Keputusan Bupati.

C. Sanksi dan Pemulihan Nama Baik

Setiap pejabat/pegawai yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang terhadap pelapor atas pelaporan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kode etik

yang disampaikan pelapor, dapat diberikan sanksi atas perbuatannya tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila pejabat/pegawai yang dilaporkan terkait dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kode etik tidak terbukti melakukan kesalahan atau melanggar hukum, berhak mendapatkan pemulihan nama baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

A. Pelaporan

Tim Penerima Pengaduan melaporkan penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kode etik secara berkala kepada Bupati. Kewenangan untuk mempublikasikan penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi berada pada Bupati. Informasi yang dapat dipublikasikan hanya terkait status dan statistik penanganan, dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah. Dalam hal Pelapor (*Whistleblower*) meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Penanggung Jawab Tim Penerima Pengaduan wajib menginformasikan status penanganannya dengan memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor (*Whistleblower*) tersebut.

Apabila berdasarkan hasil audit ditemukan pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana korupsi, laporan disampaikan kepada:

1. Instansi Penyidik (Kejaksaan/Kepolisian/KPK) yang akan digunakan sebagai informasi/bahan penanganan lebih lanjut; dan
2. Atasan langsung dari pejabat/pegawai yang diaudit atau pejabat yang berwenang yang akan menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam laporan.

Akan tetapi apabila dari hasil audit ditemukan pelanggaran yang memerlukan tindak lanjut, tetapi tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, maka laporan hasil audit tidak perlu disampaikan ke instansi penyidik.

B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit

Pemantauan hasil penanganan laporan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kode etik dilakukan oleh Tim Penerima Pengaduan cq. Inspektorat baik secara langsung melalui pemutakhiran data, rapat koordinasi, monitoring oleh pejabat yang

menangani, atau pemantauan secara tidak langsung melalui komunikasi elektronik dan melalui surat.

Pemantauan penanganan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran dikelompokkan menjadi status dalam proses dan status selesai disertai bukti-bukti.

Status penanganan pengaduan (*whistleblowing*) dianggap selesai jika auditan telah menyelesaikan seluruh rekomendasi dalam laporan hasil audit investigatif namun jika auditan tidak menindaklanjuti laporan hasil audit investigatif sesuai rekomendasi maka akan diteruskan ke Aparat Penegak Hukum maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dilakukan pemrosesan secara hukum.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Hj. DILLAH HIKMAH SARI

IRBAN	SEKRETARIS	INSPEKTUR
		

IRBAN : 
HENDRI SY. SE
NIP. 19780309 200312 1 003

SEKRETARIS : 
DRS. HADI FIDAUSS, M.Si
NIP. 19670722 198008 1 001

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan



MOHD. IDRIS, SH, MM
Pembina TK I /IV/B/1
NIP. 19700323 200312 1 004